

**PERBUATAN IGK YANG MENJUAL GAS LPG TIDAK SESUAI DENGAN ISI  
BERSIH ATAU NETTO DAN MEMPERDAGANGKAN TANPA IZIN USAHA  
DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

**Bryan Semiardi**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Gas LPG merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kebutuhan dapur untuk memasak dan untuk melakukan kegiatan usaha namun, sering kali ditemui bahwa Gas LPG yang beredar di masyarakat tidak sesuai isi bersih atau netto yang tercantum pada label. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan sering kali mengabaikan izin usaha dagang karena izin dianggap tidak terlalu penting keberadaannya. IGK merupakan terdakwa dalam kasus penjualan Gas LPG karena IGK telah menjual Gas LPG dengan cara membeli Gas LPG dari INS yang telah dipindahkan isinya dari tabung Gas LPG berukuran 3 Kg ke tabung Gas LPG berukuran 12 Kg. Usaha Gas LPG yang dijalankan oleh IGK juga tidak dilengkapi dengan izin usaha dagang. Tindakan yang dilakukan oleh IGK adalah menjual Gas LPG yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto dan memperdagangkan Gas LPG tanpa ada izin usaha dagang, maka timbul pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan oleh IGK telah memenuhi rumusan perbarengan karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan studi kepustakaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh IGK telah memenuhi rumusan perbarengan atau konkursus realis atas tindakan memperdagangkan Gas LPG yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto dan memperdagangkan tanpa izin usaha perdagangan di Denpasar(Bali) karena telah memenuhi semua unsur Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

**Kata Kunci : Gas LPG, Izin Usaha Dagang, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**

**IGK ACTIONS THAT SELL LPG GAS ARE NOT IN ACCORDANCE WITH  
THE NET OR NET CONTENT AND TRADE WITHOUT TRADING BUSINESS  
LICENSES IN TERMS OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING  
CONSUMER PROTECTION AND LAW NUMBER 7 OF 2014  
CONCERNING TRADE**

**Bryan Semiardi**

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*LPG Gas is an indispensable tool in kitchen needs for cooking and for conducting business activities however, it is often found that LPG Gas circulating in the community is not suitable net content stated on the label. Business actors in business activities in the field of trade often ignore the license of trading business because the permission is considered not very important existence. IGK was a defendant in the case of the sale of LPG Gas because IGK had sold LPG gas by purchased LPG Gas from INS that had been transferred from LPG Gas Tubes measuring 3 Kg to LPG Gas cylinders measuring 12 Kg. The LPG Gas business operated by IGK is also not provided with a trading business license. The action performed by IGK is to sell LPG gas that is not in accordance with net content or net and trade LPG gas without any trading business permit, then the question arises whether the action taken by IGK has fulfilled the formulation of the line because In relation to Act number 8 year 1999 about consumer protection and Act number 7 year 2014 about trade. This study uses normative juridical legal research and Literature studies referring to Act Number 8 year 1999 about consumer protection and Act Number 7 of 2014 about trade, it can be concluded that Action performed by IGK has fulfilled the formulation of a market or a realist's realization of the action of trading LPG Gas that is not in accordance with net content or net and trades without the license of trading business in Denpasar (Bali) because it has been Fulfill all elements of article 62 section (1) Act number 8 year 1999 about consumer Protection and Article 106 Act Number 7 year 2014 about trade.*

**Keywords :***LPG Gas, business license, article 62 section (1) Act number 8 year 1999 about consumer Protection, Article 106 Act Number 7 year 2014 about trade.*